

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

DKI Serahkan Kompensasi Normalisasi Ciliwung

Jakarta masih terus baanjir. Normalisasi dan restorasi sungai terlaksana baru sepanjang tujuh kilometer.

JAKARTA - Pembayaran pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Ciliwung akhirnya diseragkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyerahan dilakukan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pembayaran, sekarang ada di BPN. Dari administrasi sudah beres. Tinggal BPN menyatakan itu sah atau tidak milik si A, B. Jika sah, ya bayar," kata Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis. Menurut Heru, besaran nominal pembayaran atas bidang lahan yang dibebaskan ditentukan oleh BPN.

Hal itu seperti ada dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Tahun 2023.

Heru mengungkapkan bahwa normalisasi dan restorasi sungai telah terlaksana sepanjang tujuh kilometer.

Lalu, peningkatan kapasitas tampungan air saat ini memiliki volume sebesar 269.355 meter kubik. "Normalisasi tujuh kilometer itu ada di dua wilayah. Jakarta Timur ada, Jakarta Selatan ada," ujar Heru.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menangani kompensasi pembebasan tanah normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya penanganan banjir.

"Kiranya kompensasi pembebasan tanah dibayar secara berbarengan," kata Justin dalam rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur

DKI Tahun 2023.

Justin menjelaskan, normalisasi sungai dengan target kurang lebih tujuh kilometer tersebut pada tahun ini akan dilakukan tahapan pembebasan tanah. Dia mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menangani pembebasan tanah dalam normalisasi Sungai Ciliwung itu agar tidak membebani masyarakat.

Terlebih, dia menemukan di lapangan adanya tindakan dari biro jasa tertentu yang dikhawatirkan membuat kesenjangan di tengah masyarakat. "Saya ingin mengingatkan kembali bahwa di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur masih saja banyak biro-biro jasa yang memanggil masyarakat terkait pengurusan surat-surat," ujarnya.

Diharapkan tindakan cepat dari Pemprov DKI mampu menekan kesenjangan antara pihak yang menggunakan biro jasa dan mengurus sendiri. Karena biro jasa ini mematok 2,5

persen dari pembayaran.

Total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi adalah 33 km. Saat ini, normalisasi telah rampung untuk 16 km. Pekerjaan dilakukan sejak 2014. Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter. Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan normalisasi Ciliwung untuk menangani banjir di Jakarta.

Masih Banjir

Sementara itu, sejumlah wilayah Jakarta masih terus dilanda banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) DKI mengumumkan, banjir terjadi di 18 rukun tetangga (RT) Jakarta Timur (Jakarta Timur) karena luapan Kali Ciliwung pada hari Kamis

"Kami mencatat banjir bertambah dari 13 menjadi 18 RT," kata Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji. Isnawa menjelaskan, banjir melanda Bidara Cina dengan ketinggian air 30 hingga 40 sentimeter karena luapan Kali Ciliwung.

Lalu, Kampung Melayu (40-80 cm), Cawang (30) dan Cililitan (60 cm). Hujan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya Rabu (17/4) menyebabkan kenaikan status Pos Depok menjadi Siaga 3 (Waspada), Pos Pantau Sunter Hulu juga Siaga 3.

Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 267 petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir. BPBD telah memetakan memang ada 25 kelurahan rawan banjir. ■ **wid/Ant/G-1**